

# PERANAN KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KELURAHAN KOTA BANGUN KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN

Oleh:

Open Sastramaeli Gulo <sup>1)</sup>

Elisabeth Sitepu <sup>2)</sup>

Fajarman Halawa <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[open.sastra.gulo@gmail.com](mailto:open.sastra.gulo@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Elisabeth.sitepu20@gmail.com](mailto:Elisabeth.sitepu20@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Fajarhalawa200@gmail.com](mailto:Fajarhalawa200@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The purpose of the research was to find out the leadership role of the lurah in the development of road infrastructure in Kota Bangun Village, Medan Deli District, Medan City, to find out the obstacles faced by the lurah in carrying out road infrastructure development and to find out the condition of road infrastructure development. Research using descriptive qualitative method. This study used informants from the Kota Bangun urban village head, village staff and the community. Research analysis using descriptive qualitative. The results showed that the urban village head of Kota Bangun in planning the construction of road infrastructure had not shown a maximum role, where the construction carried out was not completed on time. Factors inhibiting the leadership role of the Kota Bangun sub-district head in the development of road infrastructure, namely: lack of funds, lack of communication and lack of community involvement.*

**Keywords:** *Lurah Leadership, Development, Road Infrastructure*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian dilakukan yaitu mengetahui peran kepemimpinan lurah terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, mengetahui hambatan yang dihadapi lurah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan informan lurah Kelurahan Kota Bangun, Staf Kelurahan dan masyarakat. Analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan lurah Kelurahan Kota Bangun dalam merencanakan pembangunan infrastruktur jalan belum menunjukkan peran yang maksimal, dimana pembangunan yang dilakukan tidak selesai tepat waktu. Faktor penghambat peranan kepemimpinan lurah Kelurahan Kota Bangun dalam pembangunan infrastruktur jalan, yaitu : kurangnya biaya, belum terciptanya komunikasi dan kurang melibatkan masyarakat.

**Kata kunci:** *Kepemimpinan Lurah, Pembangunan, Infrastruktur Jalan*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan nasional maka harus didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan dalam kondisi dan situasi yang kondusif dan tertib baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah termasuk pada tingkat kelurahan.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2016 bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan diarahkan untuk melayani dan mengayomi masyarakat, dapat memprakarsasi dan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini sebagai unit dalam pemerintahan harus dapat mengkoordinasikan dan mendayagunakan

fungsi dari setiap elemen yang ada di kelurahan agar dapat berkontribusi bagi proses pembangunan, sehingga peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada pada tingkat kelurahan sangat dibutuhkan partisipasinya dalam menunjang pembangunan yang dilakukan di kelurahan.

Pemerintah hanya berperan sebagai stimulis dalam penyedia dana pembangunan, dimana dana pembangunan pada setiap kelurahan terbatas. Untuk itu pemerintah melakukan rangsangan dengan memancing swadaya dari masyarakat. Dalam pembangunan kelurahan maka pendekatan yang dilakukan harus secara terpadu dan menyeluruh dengan melakukan koordinasi yang dinamis secara berkelanjutan dengan perlu diperhatikannya antara keseimbangan kewajiban antara kegiatan masyarakat dengan kegiatan pemerintah.

Tujuan pembangunan dapat direalisasikan jika dilakukan dengan pemanfaatan dan pengembangan potensi yang sebaik-baiknya. Untuk itu harus dilakukan pembangunan sumber daya manusia secara maksimal agar tujuan pembangunan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Kepala kelurahan merupakan penyelenggaran dalam menjalankan roda pemerintahan dalam wilayah kelurahan. Kepala kelurahan juga bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menjaga dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam suatu kelurahan serta dapat menciptakan sikap gotong royong pada masyarakat.

Pemerintah seharusnya mengikutsertakan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan berarti memberdayakan masyarakat itu sendiri, sehingga efektivitas pemerintah menjadi semakin meningkat. Dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat harus dilibatkan dengan demikian dapat memberdayakan masyarakat, dimana pembinaan masyarakat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan. Pembangunan daerah merupakan kegiatan

yang utama dilakukan oleh pemerintah daerah tak terkecuali dengan kelurahan. Dalam pembangunan daerah di kelurahan dibutuhkan adanya partisipasi dari seluruh unsur pemerintahan di kelurahan. Salah satu pembangunan yang sering dilakukan di kelurahan adalah pembangunan infrastruktur jalan, dimana pada setiap kelurahan memiliki jalan-jalan kecil yang sebagian besar masih dengan lapisan tanah, sehingga dibutuhkan pembangunan agar memiliki lapisan yang keras, sehingga dapat dilalalui oleh kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat sehari-hari yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Peningkatan perekonomian suatu daerah dapat dilakukan jika keadaan infrastuktur jalan di daerah tersebut juga baik, dimana jalan yang baik akan memperlancar arus masuk dan keluar dari daerah tersebut. Jika kondisi jalan pada suatu daerah juga kurang baik maka laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga menjadi kurang baik. Perekonomian suatu daerah yang semakin meningkat akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk itu pembangunan infrastruktur jalan sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya di tingkat kelurahan.

Menurut Sumadiasa, dkk (2016:41) bahwa dalam mempercepat pembangunan nasional maka salah satu apek yang paling mendukung adalah pembangunan jalan yang memiliki peran utama dalam menggerakkan roda perputaran ekonomi. Perekonomian suatu daerah akan tumbuh dengan baik jika sarana dan prasarana tersedia dengan baik khususnya jalan yang merupakan sarana transportasi seperti sarana telekomunikasi, energi dan sanitasi, sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan menjadi pondasi yang kokoh dalam menciptakan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan akan semakin meningkatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memberikan dukungan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yaitu dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dengan bentuk kerjasama investasi, garansi, subsidi serta menghapus pajak, dimana hal ini sudah tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005 yang merupakan pengganti Kepres No. 7 Tahun 1989. Pemberian ganti rugi yang dilakukan jika proyek yang diajukan sudah lolos dari penyaringan yang dilakukan oleh komite yang dibentuk untuk itu yaitu KKPPi dan Komite Pengelolaan Resiko Departemen Keuangan (KPRDK). Tujuan dari perpres ini adalah untuk membuat paradigma baru dalam hal kerjasama antara setiap badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi penerapan kebijakan otonomi daerah.

Terdapat tiga pilar utama pemerintah daerah sebagai mana tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Pilar-pilar tersebut yang berhubungan dengan konsep desentralisasi. Pembangunan daerah yang dilaksanakan di daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini sudah terjadi pergeseran kebijakan desentralisasi terutama pada regulasi yang berhubungan langsung pada perubahan konsep pembangunan daerah. Dalam hal ini pemerintah kelurahan yang merupakan tingkat pemerintah daerah terendah telah dapat memegang kendali dalam pembangunan kelurahan. Lurah beserta dengan jajarannya merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pembangunan yang terjadi pada tingkat kelurahan juga sangat dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah kelurahan tersebut. Pemerintah kelurahan memiliki tanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan di kelurahan termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Untuk melakukan pembangunan maka kelurahan harus melakukan musrenbang. Dalam

Musrenbang dibuat kesepakatan antara setiap pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan. Musrenbang yang dilakukan didasarkan pada Rencana Strategis yang sudah disusun di kelurahan. Terlaksananya Musrenbang dapat membuat terjadinya kesepakatan dalam meningkatkan pembangunan kelurahan dengan mengetahui potensi yang terdapat di dalam kelurahan maupun dari luar kelurahan.

Pembangunan dapat berjalan dengan baik dengan adanya perencanaan. Perencanaan yang sudah dilakukan dengan baik belum menjadi jaminan dalam berhasilnya pembangunan yang dilakukan, dimana ada kemungkinan terjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan yang dilakukan di tingkat kelurahan maka hambatan-hambatan ini harus benar-benar diketahui dan diperhatikan sehingga dapat mengatasinya jika pembangunan sudah dilaksanakan. Pembangunan yang akan dilaksanakan harus didasari pada kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut khususnya pemerintah kelurahan dan masyarakat yang ada di kelurahan.

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibutuhkan tenaga penggerak yang dapat melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang dilaksanakan. Untuk itu peran pemerintah kelurahan sangat penting dimana lurah sebagai Kepala Kelurahan merupakan pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dan merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Lurah harus dapat mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa kepala kelurahan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Pembangunan di kelurahan sangat penting

dilakukan salah satu diantaranya adalah pemangunan pembangunan infrastruktur jalan yang sangat bermanfaat sebagai sarana untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lainnya. Infrastruktur jalan raya akan menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, dimana dengan adanya sarana jalan raya maka arus masuk dan keluar dari suatu daerah menjadi lancar, dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tempat tersebut.

Kelurahan Kota Bangun merupakan elurahan ini masih banyak memiliki infrastruktur jalan raya yang rusak, sehingga kondisinya becek dan berdebu. Kondisi jalan raya yang rusak membuat terganggunya aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang rusak membuat semakin banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dimana semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan. Pembangunan infrastuktur jalan raya dapat mempercepat kegiatan masyarakat sehari-hari baik dalam hal perekonomian maupun dalam hal sosial.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan raya sering timbul permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang berasal dari aparat kelurahan maupun dari masyarakat kelurahan itu sendiri. Terjadinya hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari lurah sebagai kepala pemerintahan yang dapat mengatasi hal tersebut. Lurah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan dan mengarahkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang dilakukan. Didasarkan pada fenomena yang terjadi di kelurahan Kota Bangun perlu dilakukan penelitian tentang “Peran Kepemimpinan Lurah terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan”

### **Tujuan Penelitian**

1. Dapat diketahui peran lurah dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
2. Dapat diketahui hambatan yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan

Medan Deli, Kota Medan.

3. Dapat diketahui mengetahui kondisi pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Peneliti memilih daerah ini karena berdasarkan pengamatan penulis, terdapat permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan sehingga diperlukan kepemimpinan lurah yang baik dalam menjalankan pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah lurah Kelurahan Kota Bangun, Staf Kelurahan dan masyarakat. Informan Informan dalam penelitian ini adalah Bapak M. Fiqih Hidayah, ST, Lurah Kelurahan Kota Bangun, ibu Rosnani Hasibuan, SE, Kasi Pembangunan Kelurahan Kota Bangun, Bapak Muhammad Halim sebagai Kepala Lingkunga V, Bapak Zulfikli sebagai Kepala Lingkungan VI dan tokoh masyarakat di Kelurahan Kota Bangun.

Analisis data kualitatif dimulai dari melakukan analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Bentuk analisis data yang digunakan penulis disini adalah deskriptif kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kepemimpinan Lurah dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda. Ada perannya yang besar dan ada pula yang perannya hanya tergolong kecil. Kedudukan seseorang dalam suatu instansi pemerintah membuat perannya juga lebih besar dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Lurah sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan kelurahan memiliki peran yang besar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan tak terkecuali dalam pembangunan yang terjadi di

kelurahan.

Tanpa adanya peran lurah yang maksimal maka pelaksanaan dari setiap kegiatan yang dilakukan juga menjadi kurang maksimal. Dalam hal ini lurah memiliki banyak peran agar suatu kegiatan dapat berlangsung dengan baik peran tersebut dapat sebagai perencana, pelaksana dan pengawas terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan. Semakin baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan tentu akan menghasilkan pembangunan infrastruktur yang maksimal.

Dalam penelitian ini, peranan lurah dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kota Bangun dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sebagai Perencana

Sebagai perencana, lurah harus merumuskan suatu rencana melalui penelaahan terhadap fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan suatu pembangunan yang akan dilakukan. Dalam perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan ahli-ahli yang berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan sehingga dapat dibuat suatu konsep pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan teori-teori yang ada, sehingga kelak tidak menimbulkan masalah setelah pembangunan selesai dilakukan. Perencanaan yang matang akan membuat proses kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pembangunan jalan di Kelurahan Kota Bangun sudah dimulai sejak tahun 2018 hingga sampai 2023 sekarang dan akan terus dilanjutkan. Sebelumnya jalan di lingkungan Kelurahan Kota Bangun masih berlapis tanah dan bebatuan atau kerikil kasar dan kondisi jalannya sangat rusak dan berdebu.

Peran kepemimpinan lurah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun dilakukan dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat di kelurahan Kota Bangun. Selanjutnya lurah membawa aspirasi tersebut ke pemerintah kota Medan. Dalam hal ini lurah berperan sebagai fasilitator.

Dalam melakukan pembangunan jalan

di Kelurahan Kota Bangun pemerintah kelurahan Kota Bangun tidak melibatkan *stakeholder*. Hal ini disebabkan pembangunan jalan di kelurahan kota Bangun menyesuaikan dengan mekanisme atau regulasi yang telah ada yaitu setiap usulan pembangunan misalnya jalan akan dibahas dalam musrenbang selanjutnya akan diteruskan kepada pemko medan melalui dinas tertentu.

Dalam pembangunan jalan di Kelurahan Kota Bangun ditentukan setelah terlebih dahulu melakukan musrenbang. Sebulan setelah musrenbang dilakukan baru dilakukan realisasi pembangunan jalan raya. Pihak pemerintah Kota Medan akan meninjau dan melakukan survei melalui dinas tertentu, dimana pembangunan yang dilakukan adalah usulan yang tahun sebelumnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jalan di Kelurahan Kota Bangun sudah berjalan 85 % yang teraspal, sehingga kondisi jalan di kelurahan Kota Bangun sudah tergolong sangat baik. Hal ini membuat tanggapan yang positif terhadap kepemimpinan lurah di Kelurahan Kota Bangun. Dalam melaksanakan pembangunan jalan raya yang dilakukan pemerintah kota Medan melalui pemerintah kelurahan Kota Bangun pengawasannya dilakukan oleh Babinsa, Babinktimas, kepala lurah dan juga oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa lurah Kelurahan Kota Bangun belum menunjukkan peran yang maksimal dalam merencanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang dapat diketahui dari penyelesaian pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai jadwal. Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaannya, baik di bidang birokrasi pemerintahan maupun dalam hal pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan.

#### 2. Sebagai Pelaksana

Dalam kegiatan infraskturkur jalan yang dilakukan lurah merupakan pelaksana kegiatan dengan melibatkan staf-staf kelurahan dan orang-orang yang memiliki

pengalaman dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dalam hal ini semua arahan pembanguna yang dilakukan bersumber dari lurah sebagai pemimpin tertinggi dalam kelurahan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh lurah harus didasarkan pada hasil Musrenbang yang telah terlebih dahulu dilakukan di kelurahan. Selanjutnya lurah melakukan koordinasi dengan BPAKAl Kelurahan dan melakukan pengontrolan terhadap keuangan kelurahan walaupun sudah dianggarkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran lurah sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur jalan sudah berjalan dengan baik, dimana kegiatan pembangunan yang dijalankan sudah sesuai dengan RKP Kelurahan. Walaupun pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yaitu kurangnya koordinasi antara setiap perangkat kelurahan serta kurang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan yang dijalankan oleh lurah akan menjadi lebih baik jika koordinasi yang terjalin antara setiap pelaksana kegiatan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, sehingga terjalin sinergisme antara setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan. Pelaksanaan pembangunan jalan yang berlangsung dengan baik akan membuat pengerjaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan dapat selesai tepat waktu.

### 3. Sebagai Pengawas

Dalam melakukan setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah kelurahan maka lurah dapat berperan sebagai pengawas. Perannya sebagai pengawas agar tidak terjadi penyelewengan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Pengawasan yang semakin baik maka peluang terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan juga semakin kecil,

sehingga mutu pekerjaan yang dihasilkan juga sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan dengan demikian pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di kelurahan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa lurah pada umumnya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Pengawasan juga dilakukan oleh staf-staf lurah yang memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan pembangunan yang dilaksanakan. Dalam melakukan pengawasan, lurah meminta laporan tertulis dari bawahannya tentang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Setelah adanya laporan tertulis, selanjutnya lurah akan mencek ke lapangan tentang laporan yang ada. Jika tidak sesuai dengan laporan yang telah dibuat maka lurah langsung melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian akibat bobot pekerjaan yang tidak tepat dan menjaga kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat selesai tepat waktu.

Menurut Kepala Kelurahan Kota Bangun menjelaskan bahwa sudah sering dilakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan tersebut sehingga apapun permasalahan di lapangan bisa teratasi. Sementara itu, Kepala Kelurahan juga melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dan meminta laporan pembangunan kepada Kaur Pembangunan Kelurahan Kota Bangun. Menurut Kasi Pembangunan Kelurahan Kota Bangun, Kepala Kelurahan sudah melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan dan juga sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada di kelurahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh kelurahan, menggunakan teori peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2016: 142-150), dimana pemerintah memiliki lima fungsi dalam menjalankan pembangunan yaitu :

1. Sebagai Stabilisator

Menurut Siagian (2016:142), sebagai stabilisator artinya pemerintah harus dapat menciptakan keadaan yang stabil tanpa gejolak dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi jika tercipta transparansi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat kelurahan. Adanya penyelewengan yang terjadi dalam pembangunan yang dilakukan membuat tidak menerima dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Jika hal ini terjadi maka peran pemerintah sebagai stabilisator tidak terjadi. Untuk itu dibutuhkan lurah dengan kepemimpinan yang dapat membuat pendekatan yang persuasif kepada masyarakat, sehingga tercipta suasana yang kondusif yang dapat memperlancar kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di kelurahan.

Dalam melaksanakan perannya sebagai stabilisator, pemerintah kelurahan telah melakukan berbagai upaya dalam perencanaan program pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan dalam beberapa bentuk diantaranya :

- a. Lurah ikut serta dalam melakukan sosialisasi pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukan dengan mengikuti rapat tentang nilai pagu anggaran, mekanisme yang akan dilakukan serta tahapan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan.
- b. Lurah ikut dalam membentuk pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Selanjutnya lurah mengundang masyarakat untuk ikut dalam rapat tentang pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan. Dalam rapat tersebut lurah beserta staf kelurahan akan memaparkan pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan di kelurahan beserta besarnya anggaran yang akan digunakan. Dalam rapat tersebut lurah juga menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberi masukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilakukan

maka dapat membuat kondisi yang lebih stabil dalam masyarakat kelurahan, sehingga tidak terjadi perpecahan pada masyarakat akibat pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.

Dalam hal ini harus ada koordinasi yang baik antara setiap masyarakat dan kelompok masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaloh (2017:275) yang menyatakan bahwa semakin banyak unit yang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan maka akan membuat pengawasan yang dilakukan menjadi semakin baik, sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan akan semakin baik.

## 2. Sebagai Inovator

Peran lurah sebagai inovator artinya lurah harus dapat membuat inovasi-inovasi tertentu yang dapat mempercepat atau memperlancar pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukan. Lurah yang memiliki inovasi dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu lebih menguasai pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga penyelesaian pekerjaan pun menjadi lebih cepat. Dalam hal ini inovasi sangat penting dalam menciptakan suatu metode pekerjaan, sistem pekerjaan serta metode kerja yang akan diterapkan dalam penyelesaian kegiatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2016:148) yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjadi sumber hal yang baru dengan memainkan peran yang efektif sehingga memiliki legitimasi yang tinggi di mata masyarakat. Pemerintah harus melakukan penerapan inovasi secara terlebih dahulu dalam lingkungan birokrasi pemerintah dimana sifat inovasi yang dilakukan bersifat konseptual, metode kerja, sistem kerja serta mekanisme kerja.

Pemerintah Kelurahan Kota Bangun dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan telah membuat beberapa inovasi diantaranya :

- a. Membuat inovasi sistem dalam menekan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan.
- b. Menciptakan prosedur kerja yang dapat

mengatasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Penanganan program pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan Kota Bangun telah berlangsung mulai dari tahun 2018 hingga 2023, dimana setiap tahun terdapat pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan, sehingga dibutuhkan suatu inovasi sistem dan prosedur kerja agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan efisien..

### 3. Sebagai Modernisator

Peran lurah sebagai modernisator artinya lurah harus dapat berpikir secara modern, sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan jaman. Dalam hal ini lurah juga harus ikut memodernisasi pemikiran masyarakat yang masih tertinggal, sehingga dapat menerima pembangunan yang akan dijalankan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siagian (2016:150) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembangunan diperlukan modernisator yang dengan meningkatkan pengathuan yang cukup, kehandalan dan kemauan, serta kehandalalan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan pembangunan yang akan dilakukan. Peran pemerintah sebagai modernisator dapat membuat masyarakat meninggalkan cara berpikir yang kuno dengan meningkatkan pengetahuan sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat ke arah yang semakin maju. Dalam hal ini pemerintah kelurahan Kota Bangun telah melakukan beberapa hal diantaranya :

- a. Meningkatkan keahlian pada orang-orang yang berkompeten dalam melaksanakan pembangunan infastruktur jalan. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakannya dalam diklat-diklat yang dapat menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang pembangunan khususnya infrastruktur jalan.
- b. Memberdayakan masyarakat yang ikut berperan dalam pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan sebagian masyarakat dalam pembangunan, serta mendidik dan melatihnya untuk mengerti tentang hal-hal

yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan.

Kemampuan pemerintah dalam manajemen dan mengelolah program pembangunan infrastruktur jalan yaitu sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam pembuatan kebijakan dan juga orang-orang yang melaksanakannya sebab hal ini sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun. Kualitas manusianya juga harus diperhatikan yaitu iorang yang memiliki kompetensi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dapat terhindarkan dari hal-hal yang merugikan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kerja sama yang hanya menguntungkan satu pihak. Secara kuantitas, instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas pembangunan jalan harus memiliki pegawai yang cukup buat melaksanakan aktivitas tersebut. Sehingga apabila kegiatan dijalankan maka tidak terjadi kendala terhadap pekerjaan di lapangan nantinya.

### 4. Sebagai Pelopor

Peran lurah sebagai pelopor artinya lurah harus dapat memelopori pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukannya. Dalam hal ini sebagai pemerintah lurah harus dapat berkorban untuk kepentingan negara sehingga pembangunan yang dilakukan oleh negara di kelurahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2016:152) yang menyatakan bahwa lurah sebagai wakil pemerintah dalam pemerintahan kelurahn harus dapat menjadi panutan dalam masyarakat, sehingga dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan mau diatur oleh lurah khususnya dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Peran lurah sebagai

pelopor di kelurahan Kota Bangun dapat dilihat dari:

- a. Lurah memilih petugas yang berkompeten dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur jalan.
- b. Menangani berbagai kendala yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur jalan dengan dukungan dari petugas yang telah dibentuk.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan lurah langsung turun ke lokasi pembangunan yang akan dilakukan dengan langsung memberikan arahan dan petunjuk dalam pengerjaan pembangunan yang dilakukan. Pemerintah kelurahan berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan. Dari sudut pandang masyarakat peran pemerintah sebagai pelopor dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun sehingga dapat memperlancar kegiatan masyarakat dalam kelurahan.

## 5. Sebagai Pelaksana

Peran lurah sebagai pelaksana artinya lurah bertanggungjawab atas pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Lurah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur jalan harus dapat mengatasi segala permasalahan yang timbul dengan meningkatkan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2016:154) yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelaksana program pembangunan harus dapat memperhitungkan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pembangunan yang akan dijalankan. Pemerintah harus dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menghambat pembangunan. Pemerintah kelurahan Kota Bangun dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur telah melakukan L

- a. Pembuatan standarisasi pembangunan infrastruktur jalan dengan membuat pembangunan jalan sesuai dengan kaulitas jalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Lurah langsung turun ke lokasi pembangunan infrastruktur jalan dengan memberikan motivasi kepada bawahan

sebagai pelaksana program pembangunan infrastruktur jalan dan mengajak masyarakat turut serta dalam pembangunan yang dilakukan.

Pembangunan infrastruktur jalan dilakukan direncanakan dengan seksama dengan orientasinya adalah terjadinya perubahan dan pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2016:156) yang menyatakan bahwa dalam pembangunan infrastruktur jalan, pengawasan yang dilakukan dalam hal standarisasi dan regulasi dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum.

## Hambatan yang Dihadapi Lurah dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pelaksanaan pembanguna infrastruktur di kelurahan Kota Bangun mengalami berbagai hambatan khususnya minimnya anggaran, sehingga pembangunan infrastruktur jalan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat di kelurahan. Untuk mengalokasikan dana yang ada sering terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Masyarakat di kelurahan Kota Bangun tidak aktif mengikuti pembangunan yang dilakukan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan antara lurah, perangkat lurah serta masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa biaya pembangunan infrastruktur jalan masih tergolong minim, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak selesai secara keseluruhan sesuai dengan yang telah direncanakan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pembangunan Infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun, yaitu :

1. Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang dianggarkan, sehingga membuat pembangunan infrastruktur jalan menjadi kurang maksimal.
2. Komunikasi yang baik belum terbina dengan baik antara setiap kaur pemerintah kelurahan.
3. Pemerintah kelurahan kurang melibatkan masyarakat.

## Kondisi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jalan di Kelurahan Kota Bangun masih 85 % yang teraspal, sehingga kondisi jalan di kelurahan Kota Bangun belum optimal, walaupun sebagian besar sudah baik. Hal ini membuat tanggapan yang positif terhadap kepemimpinan lurah di Kelurahan Kota Bangun. Pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Kota Bangun belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor termasuk kurangnya dana yang telah dianggarkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana pembangunan yang dilakukan tidak selesai secara keseluruhan dan masih adanya jalan yang mengalami kerusakan. Ketercapaian pembangunan infrastruktur jalan masih 85 %, sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Walaupun sudah dilakukan Musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilakukan membuat pembangunan infrastruktur jalan tidak merasa dilakukan dalam kelurahan, sehingga ada jalan-jalan tertentu yang belum terbangun yang membuat masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut menjadi kecewa. Jika hal ini dibiarkan dapat menjadi batu sandungan dalam melakukan pembangunan lainnya di kelurahan.

## 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Peran kepemimpinan lurah Kelurahan Kota Bangun telah dilaksanakan terkhusus dalam membuat perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah masuk dalam RKPK dan memastikan bahwa pembangunan jalan dilaksanakan namun dalam peran sebagai inovator dan pelopor belum terlaksana dengan baik.
2. Faktor penghambat peranan kepemimpinan lurah Kelurahan Kota Bangun dalam pembangunan infrastruktur

jalan, yaitu : kurangnya pagu anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan, belum terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah kelurahan dengan badan-badan lainnya serta dengan masyarakat Kelurahan Kota Bangun, pemerintah kelurahan kurang melibatkan masyarakat kelurahan Kota Bangun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

3. Kondisi infrastruktur jalan di Kelurahan Kota Bangun baru 85 % yang teraspal, sehingga kondisi jalan di kelurahan Kota Bangun belum optimal, walaupun sebagian sudah tergolong baik.

## Saran

1. Dalam membuat anggaran, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang, sehingga sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan hingga selesai.
2. Disarankan pemerintah Kelurahan Kota Bangun agar menjalin kerjasama dengan *stakeholder* dan dalam mencari dana pembangunan sebagai peran inovator dan pelopor serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Kaloh, J. 2017. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Bineka Cipta.
- Mardikanto, T. dan P. Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Siagian. 2016. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strategi)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo. Persada. Jakarta.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat "Merangkai Sebuah Kerangka"*.

Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Subandi, 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan Kesatu. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.

Sumadiasa, I Ketut, N. Made Tisnawati, dan I. G.A.P. Wirathi. 2016. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. E-Jurnal. Universitas Udayana, 5(7).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Wukir, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*. Cetakan I. Multi Presindo, Yogyakarta.

Yulk, G. 2017. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Edisi Ketujuh. Indeks. Jakarta.